BAB III

ARAB SPRING DI TUNISIA

A. Awal Munculnya *Arab Spring* di Tunisia

Perubahan situasi politik dan pemerintahan negara-negara di kawasan Timur Tengah ditandai dengan geliat gerakan rakyat menggugat berbagai kepemimpinan nasional mereka. Peristiwa tersebut dikenal sebagai kebangkitan dunia Arab atau Musim Semi Arab (Arab *Spring*). Pada bulan Januari 2011, gelombang revolusi dan transisi terjadi di Tunisia kemudian menjalar ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Rakyat Arab menyebut peristiwa politik penting ini dengan sebutan *al Tsaurat al-Arabiyyah* yaitu revolusi yang akan mengubah tatanan menuju masyarakat dan bangsa ideal setelah sekian lama dipimpin dengan sistem otoriter, kekuasaan yang tidak dibatasi, pembatasan kebebasan masyarakat serta melahirkan kesenjangan antara *elite* (penguasa), yang hidup mewah, dengan rakyat yang miskin.[48]

Arab *Spring* diyakini sebagai pintu gerbang demokratisasi di Timur Tengah. Di Timur Tengah sendiri sebelumnya pernah terjadi demokratisasi. Pada gelombang demokratisasi kedua di kawasan Timur Tengah lahir beberapa pemerintahan baru maupun negara-nasional baru seperti terbentuknya Republik Syria dan Libanon pada tahun 1941 serta pemerintahan Republik Arab Mesir pada tahun 1947. Namun, pada tahun 1970-an, Timur Tengah, diwarnai dengan berbagai revolusi seperti, revolusi rakyat Libya pimpinan Moamar Khaddafi pada tahun 1969 dan Revolusi Irak pimpinan Saddam Hussein pada tahun 1971. Revolusi ini muncul sebagai reaksi dari sikap pemerintah yang otoriter. Pada gelombang ketiga, demokratisasi menjalar ke Iran pada tahun 1979. Revolusi Republik Revolusioner Islam

---

[48] Ahmad Sahide, 2015, *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hubungan Internasional vol.4 no.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hal 119, http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237/2187 diakses pada 08 November 2019

Iran tahun 1979 pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi.[49]

Istilah Arab Spring menunjukkan kejatuhan berderet rezim pemimpin-pemimpin otoriter dunia Arab. Arab *Spring* adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di wilayah Arab. Para pengunjuk rasa di wilayah Arab mendengungkan slogan *Ash-sha byurid isqat an-nizam* (rakyat ingin menumbangkan rezim ini). Sejak 18 Desember 2010, telah terjadi revolusi di Tunisia dan Mesir, perang saudara di Libya, pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Yaman, protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, Oman dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Kerusuhan di perbatasan Israel pada Mei 2011 juga terinspirasi oleh kebangkitan dunia Arab.

Protes ini menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, dan *Skype*, untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran internet oleh pemerintah. Banyak unjuk rasa ditanggapi keras oleh pihak berwajib, serta milisi dan pengunjuk rasa pro pemerintah.

Gejolak Arab *Spring* bermula dari peristiwa di Tunisia ketika seorang pemuda berusia 26 tahun, Mohammed Bouazizi, seorang penjual sayuran yang melakukan protes terhadap kekejaman pemerintahan lokal di bawah rezim otoriter Presiden Zein Al-Abidin Ben Ali. Pada 17 Desember 2010, Buoazizi bersama pedagang lainnya terjaring razia karena dianggap berjualan tanpa izin di Sidi Bouzid. Bouazizi sendiri harus menyetor denda 10 dinar (upah satu hari, setara dengan 7 USD) karena tidak memiliki ijin usaha. Namun, Buoazizi terus berjualan tanpa ijin dan juga tidak membayar denda. Hal tersebut

---

[49] Sidik Jatmika, 2013, *The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah*, Jurnal Hubungan Internasional vol.2 No.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hlm. 159 http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/343/391 diakses pada 08 November 2019

menyebabkan ia dan gerobaknya menjadi salah satu target razia aparat setempat.

Menjadi hal yang lazim di Sidi Bouzizi bahwa para pedagang kaki lima (PKL) harus memberikan uang suap kepada aparat untuk tetap bisa berjualan. Namun pada hari itu Bouazizi sedang tidak mempunyai uang untuk menyuap aparat. Pada hari tersebut ada oknum yang datang bersama rekannya mmberitahukan bahwa ia tidak memiliki ijin sehingga gerobaknya akan disita dan Bouazizi harus membayar denda. Bouazizi tidak mengalah begitu saja sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara dirinya dan oknum aparat wanita bersama temannya tersebut.

Bouazizi ditampar, wajahnya diludahi, timbangann dan gerobaknya juga disita serta mendiang ayahnya dihina oleh aparat tersebut. Perlakuan oknum terhadap Buoazizi yang sewenang-wenang tersebut membuatnya mengadu kepada Gubernur Sidi Bouzid. Pengaduan Bouazizi ini tidak mendapatkan perhatian serius dari Gubernur, bahkan Gubernur menolak untuk melihat dan mendengarkan pengaduan nasibnya. Buoazizi mengancam untuk membakar dirinya setelah Gubernur mengabaikan kedatangannya. Ia kemudian pergi dan kembali satu jam kemudian dengan membawa dua botol bensin kemudian membakar dirinya di depan kantor Gubernur pemerintah daerah, Sidi Bouzid.

Buaozizi sempat dilarikan ke rumah sakit dan Presiden Ben Ali sempat menjenguknya. Namun, Bouazizi akhirnya meninggal pada 4 Januari 2011. Aksi bakar diri *(self-immolation)* yang dilakukan oleh Bouazizi segera mendapatkan perhatian secara luas, melalui pemberitaan media-media nasional dan internasional, diikuti oleh demonstrasi yang mengguncang kekuasaan di tangan rezim otoriter di negara-negara Arab, bukan hanya di Tunisia. Bouazizi sebenarnya adalah lulusan universitas yang terpaksa menerima hidup dengan pekerjaan kasar tersebut (sebagai pedagang kaki lima/PKL) Ibu dari Mohammed Bouazizi mengatakan bahwa aksi bakar diri tersebut bukan karena faktor ideologi atau politik.

Aksi tersebut murni demi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut ibu Bouazizi, merupakan sebuah kehinaan

bagi anaknya bahwa dia menderita (dimaki dan disiksa oleh aparat) yang tidak lagi dapat dia toleransi. Aksi bakar diri yang dilakukan oleh Bouazizi merupakan pilihan hidup terbaik baginya yang tidak lagi punya harapan hidup serta tidak tahan menghadapi hidup yang hampir setiap hari diperlakukan sewenang-wenang dan dihina oleh aparat.

Bouazizi sempat dilarikan ke rumah sakit setelah membakar dirinya dan juga sempat dipindahkan ke rumah sakit kota Ben Arous, dekat Tunis. Di sana ia menjalani perawatan di Trauma Centre dan Burn. Presiden Tunisia, Zein alAbidin Ben Ali, sempat menjenguknya di rumah sakit. Namun semua sudah terlambat dan tidak mampu menyelamatkan nyawa pedagang kaki lima tersebut serta menyelamatkan kekuasaan Ben Ali. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 2011 atau 17 hari telah aksinya tersebut, Bouazizi menghembuskan nafas terakhirnya.Pada hari itu, kurang lebih 5.000 orang ikut ambil bagian dalam proses pemakamannya. Keesokan harinya, Bouazizi dimakamkan di pemakaman Bennour Garat, 10 mil dari Sidi Bouzid.

Kemarahan publik tidak hanya meluas setelah Bouazizi meninggal, tetapi hanya sehari berselang ia membakar dirinya massa kemudian turun melakukan unjuk rasa yang menyebabkan kerusuhan di kota tersebut. Aparat sempat kewalahan mengatasi kerusuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Sejumlah jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Youtube* menyorot beberapa gambar dari aksi tersebut. Dalam upayanya untuk memadamkan kerusuhan, Presiden Ben Ali mengunjungi Bouazizi di rumah sakit sebelum meninggal Namun kunjungan Ben Ali tidak berhasil memadamkan semangat perlawanan dari rakyatnya.

Setelah kematian Bouazizi, gerakan perlawanan terus terjadi hingga kekerasan meningkat terus menerus, bahkan semakin mendekati ibukota negara, Tunis. Pada tanggal 27 Desember 2010, lebih dari 1.000 warga bersama-sama dengan penduduk Sidi Bouzid mengekspresikan solidaritas dengan menyerukan suatu aksi bersama menentang pemerintahan. Pada saat yang sama, 300 pengacara mengadakan sebuah aksi demo dekat pemerintahan istana di Tunis. Demonstrasi kembali dilanjutkan pada tanggal 29 Desember 2010. Pada tanggal 30

Desember 2010, aparat membubarkan demonstrasi damai di Monastir dengan menggunakan kekerasan.

Hal ini dilakukan juga di terjadi Sbikha dan Cebba. Demonstrasi kembali dilanjutkan pada tanggal 31 Desember 2010, ketika pertemuan umum diselenggarakan oleh pengacara di Tunisia dan kota-kota lainnya. Demonstrasi juga dilanjutkan karena adanya seruan dari Kelompok Pengacara Nasional Tunisia, Mokhtar Trifi, selaku Presiden Liga Hak Asasi Manusia Tunisia atau diknal dengan *Ligue Tunisienne des Droits de l"Homme (LTDH*). Trifi mengatakan bahwa pengacara di Tunisia telah secara kejam dianiaya dan dipukuli. Tanggal 3 Januari 2011 demonstrasi dilakukan dekat kota Thala dengan mengusung isu pengangguran dan tingginya biaya hidup, namun akhirnya demonstrasi tersebut berubah menjadi anarkis.

Demonstrasi yang diikuti kurang lebih 250 orang tersebut diikuti sebagian besar mahasiswa sebagai upaya untuk mendukung aksi para demonstran di Sidi Bouzid. Sebagai responsnya, para pengunjuk rasa dilaporkan telah membakar ban dan menyerang kantor RCD atau *Rassemblement Constituonnel Democratique*. RCD adalah partai pendukung Ben Ali dan menjadi partai dominan dalam pemerintahan. Menanggapi aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan, aparat mengirim pasukan anti huru-hara untuk membubarkan para demonstran karena merusak bangunan, membakar ban, membakar sebuah bus, dan membakar dua mobil kelas pekerja pinggiran dari Ettadhame-Mnihla di Tunis. Aparat militer juga dikerahkan di banyak kota di seluruh wilayah Tunisia.[50] Banyak faktor yang menjadi pemicu sehingga aksi protes massa tesebut terus berlangsung di seluruh negeri, termasuk pemberitaan masif dari Al-Jazeera yang diambil langsung oleh masyarakat Tunisia, melalui kamera telepon seluler dan kemudian disebarkan melalui *YouTube* dan

---

[50] Apriadi Tamburaka, 2011, *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*, Penerbit Narasi,Yogyakarta, hlm 25-31

Facebook dan kemudian disebarkan lagi melalui *Twitter*, bahkan kabel pemberitaan Wikileaks.[51]

Arab *Spring* telah memunculkan konflik-konflik baru di negara-negara Timur Tengah. Berbagai kelompok kepentingan berusaha memperebutkan kursi kekuasaan yang kosong setelah tergulingnya rezim. Gelombang unjuk rasa yang terjadi juga tidak semua menemukan jalan kesuksesan. Hal ini kemudian memunculkan ketidakstabilan di negara-negara yang menemui jalan buntu. Negara-negara yang mengalami transisi dan telah berhasil menyelenggarakan pemilu selanjutnya dihadapkan pada masalah menciptakan kestabilan politik dalam negaranya. Selain menciptakan kestabilan politik, negara juga harus mampu membangun konsolidasi demokrasi yang akan membawa negara pada kondisi demokrasi yang ideal.

Pasca gejolak di Tunisia, yang terjadi di Timur Tengah adalah perebutan kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan. Hal tersebut menimbulkan ketidakstabilan dan berujung kekerasan yang menimbulkan konflik baru di beberapa negara. Pada Januari 2016 *The Economist* melansir sebuah data yang menyatakan kondisi negara-negara di Timur Tengah lima tahun setelah terjadinya Arab Spring Tunisia menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang menggunakan sistem demokrasi. Sementara Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, dan Bahrain masih menerapkan sistem autokrasi secara penuh. Di Libya, Suriah dan Yaman masih terdapat perang sipil atau dinyatakan sebagai negara gagal. Sementara negara-negara lainnya menerapkan sistem demokrasi terbatas atau autokrasi.

Samuel Huntington mengemukakan ada tiga penghambat menuju demokrasi, yaitu politik, ekonomi dan budaya. Dalam penjelasannya Huntington mrngatakan bahwa faktor budaya merupakan penghambat bagi demokrasi di Timur Tengah. Islam yang mendominasi di Timur Tengah dianggap menjadi penghambat bagi perkembangan demokrasi di Timur Tengah. namun, hal ini tidak terjadi di Tunisia. Hal tersebut tercermin dari terpilihnya partai Ennahda yang beraliran Islamis.

---

[51] Eric Goldstein, 2011, *Revolution in Arab World*, Washington Foreign Policy hlm. 69

B. Dampak Terjadinya *Arab Spring* di Tunisia

Rakyat Tunisia yang berharap besar kepada Presiden Ben Ali agar dalam kepemimpinannya mampu merubah kehidupan mereka menjadi lebih bebas dan terhindar dari pemimpin yang diktator. Masa awal kepemimpinannya, Ben Ali berhasil meningkatkan perekonomian Tunisia. Tunisia bergabung dalam *European Union* (EU) tahun 1995. Berkat bergabung dalam perserikatan tersebut Tunisia mampu meningkatkan hasil ekspor karena komoditas seperti zaitun dan jeruk sangat diminati pasar EU. Pada 1987, Ben Ali memproklamirkan era baru bagi Tunisia berdasarkan pada hukum, HAM, dan demokrasi.

Akan tetapi kenyataannya kepemimpinan Ben Ali tidak jauh berbeda dengan kekuasaan Bourguiba. Ben Ali menjadi presiden yang diktator dan otoriter. Pada masa pemerintahannya jumlah pengangguran terus meningkat, banyak pelanggaran hak asasi manusia, kebebasan pers sangat dibatasi, bahkan Ben Ali melakukan tindak korupsi yang merugikan negara. Selama 1980-an dan awal 1990-an, Tunisia menghadapi masalah ekonomi serius, seperti pengangguran kronis, neraca pembayaran defisit, dan subsidi negara yang berat dan kontrol yang tidak berimbang terhadap harga-harga. Ben Ali mengatakan akan menurunkan harga pangan, menjamin kebebasan politik, media massa, dan berjanji akan mundur dari jabatan presiden pada tahun 2014. Saat itu, Ben Ali mengatakan kepada rakyatnya untuk menciptakan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan dalam jangka waktu dua tahun untuk mengurangi tingkat pengangguran. Janji yang diucapkan oleh Ben Ali tersebut sebagai bagian dari upayanya untuk meredam kemarahan publik terhadap rezim otoritarian yang dia bangun sejak menggulingkan Bourguiba pada tanggal 7 November 1987.

Pengangguran merupakan permasalahan besar bagi Tunisia. Pengangguran di Tunisia telah mencapai lebih dari 13% umumnya namun oleh IMF meningkat setinggi 44% untuk lulusan perempuan dan 25% untuk lulusan laki-laki di daerah tertentu. Tunisia banyak meluluskan sarjana tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja bagi mereka. Hasilnya adalah banyak lulusan sarjana yang menganggur.

Permasalahan ini bagi para lulusan sarjana merupakan beban moral bagi mereka karena rasa malu terhadap lingkungannya. Pengangguran menjadi masalah utama yang tak kunjung selesai di Tunisia. Permasalahan pengangguran di Tunisia telah berlangsung sejak tahun 1960-an. Persebaran pengangguran juga bervariasi di berbagai daerah. Namun wilayah barat laut dan barat daya Tunisia menyumbang jumlah pengangguran tertinggi. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan namun tidak memberikan hasil yang signifikan. Washington Institute menyebutkan angka pengangguran di Tunisia mencapai 15% secara nasional (30% di antaranya adalah sarjana), harga bahan pokok melonjak, defisit PDB menyentuh 6%, serta mata uang Tunisia kehilangan seperempat nilainya hanya dalam waktu dua tahun. Tak hanya itu, investasi asing dan industri pariwisata terpuruk akibat serangan kelompok teror macam ISIS.[52]

Selama tahun 2001-2009, rata-rata 73.300 pekerjaan telah diciptakan setiap tahun untuk mencapai total 659.700 pekerjaan yang dibutuhkan.dengan jumlah pekerjaan yang dibuka mampu menyerap 89,3% dari permintaan lapangan pekerjaan tambahan. Namun, penciptaan lapangan pekerjaan tersebut hanya menyerap pengangguran dari lulusan sekolah menengah daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Ini mencerminkan salah satu kelemahan mendasar dari pasar tenaga kerja Tunisia, yaitu ketidaksesuaian permintaan tenaga kerja dengan pengangguran yang tersedia bahkan peningkatan antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja. Memang, selama periode 2001-2007, pekerjaan 63 yang diciptakan untuk lulusan sekolah menengah mencakup 71,7% dari lapangan pekerjaan yang tersedia. Sementara pada periode yang sama, permintaan lapangan pekerjaan untuk lulusan universitas rata-rata 41% dari permintaan global, sedangkan pekerjaan yang diciptakan rata-rata menyumbang 34,2%. Kebijakan ekonomi di bawah Ben Ali mengikuti standar Eropa, termasuk penetapan Upah Minimun

---

[52]Tirto.id, *"7 Tahun Setelah Ben Ali Lengser, Tunisia Kembali dihajar Demo"*, https://tirto.id/7-tahun-setelah-ben-ali-lengser-tunisia-kembali-dihajar-demo-cDpb dikutip pada 7 November 2019

Regional. Perkembangan sektor teknologi tinggi dibatasi oleh pemerintah sehingga pekerjaan yang sesuai untuk lulusan universitas menjadi langka.[53]

Ekonomi terhambat oleh penyalahgunaan wewenang dalam penerapan undang-undang dan peraturan, proses pengadaan yang tidak efisien, privatisasi yang dicurangi, deklasifikasi aset lahan publik, dan penyalahgunaan bank publik. Proses pengambilan keputusan yang sangat terpusat melemahkan sistem checks and balances, sehingga menghasilkan transparansi dan akuntabilitas yang rendah. Secara lebih umum, penyalahgunaan wewenang dipraktekkan dalam penerapan hukum. Kurangnya partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban yang memadai memperburuk ketidakadilan penduduk. "Keluarga" Ben Ali menggunakan posisinya untuk terlibat dalam kegiatan pencarian keuntungan. Mereka menggunakan koneksi politik yang dimiliki untuk memperkaya diri mereka. Hal yang mereka lakukan seperti memonopoli pasar, membuat peraturan yang menguntungkan mereka sendiri hingga korupsi secara langsung. Mereka juga menempatkan orang-orang yang bisa diajak “kerjasama” di pemerintahan sehingga mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengeluarkan lisensi, izin, dan kontrak yang menguntungkan bagi merek sendiri. Selama bertahun-tahun, Ben Ali mengeluarkan 22 keputusan kepresidenan yang menghasilkan 73 amandemen terhadap kode etik bisnis. Kadang-kadang hal ini dibuat untuk mengakomodir kepentingan mereka sendiri. Pada tahun 2007, misalnya, aturan dibuat mengharuskan otorisasi pemerintah untuk perusahaan yang memproduksi semen. Ini terjadi persis ketika saudara ipar laki-laki Ben Ali mendirikan sebuah perusahaan baru bernama Carthage Cement.[54]

Permasalahan ekonomi akan berdampak pada aspek-aspek lainnya jika mengalami permasalahan. Akhir masa pemerintahan Ben Ali diwarnai dengan permasalahan korupsi, tingginya angka

---

[53] Maher Gassab & Hanene B.O Jamaussi, 2014, Determinants of Graduate Unemployment in Tunisia, Almauera, Italia hlm. 3-6

[54] Paul Rivlin, 2014, Tunisia: What Ben Ali Stole,Tel Aviv University hlm 5

pengangguran dan harga pangan yang tinggi. Permasalahan pengangguran ini yang sulit untuk diatasi. Pemerintah tidak akan bisa mengurangi pengangguran jika belum membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Tunisia merupakan negara di wilayah Timur Tengah yang mempunyai ciri khas negara yang populasi penduduknya sebagian besar adalah penduduk berusia di bawah 25 tahun.[55]

Puncak krisis politik yang terjadi di Tunisia diawali dengan peristiwa bakar diri dari rakyat Tunisia yang bernama Bouazizi sebagai bentuk protes atas pemerintahan Ben Ali. Upaya politik yang dilakukan oleh Ben Ali, termasuk dengan mengunjungi Bouazizi di rumah sakit sebelum meninggal, tidak membuahkan hasil. Demonstrasi terus berlangsung di seluruh negeri, bahkan beberapa tokoh yang selama ini menjadi bagian dari rezim tidak mematuhi perintah Ben Ali . Era kekuasaan Ben Ali yang dibangun dengan tangan besi berakhir setelah menyatakan mundur dari kursi kekuasaannya sebagai Presiden Tunisia pada tanggal 14 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 waktu setempat di mana pernyataannya didelegasikan kepada Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi untuk bertindak sebagai kepala negara "sementara" selama ketidakhadirannya.

Ben Ali dan keluarganya melarikan diri ke Arab Saudi untuk menghindari tuntutan massa yang berhasil mengakhiri 23 tahun masa kejayaan kekuasaannya. Keputusan Ben Ali untuk mundur dan meninggalkan Tunisia secepatnya karena dua faktor. Pertama, gerakan massa di seluruh negeri semakin kuat yang tidak lagi mampu dikendalikan oleh aparatur negara. Para demonstran, yang pada awalnya turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Bouazizi, selanjutnya menuntut pemecatan kepala aparat setempat Khaled Ghazouani di Kef. Ben Ali tentu menyadari bahwa kekuatan massa yang semakin besar melawan rezimnya akan berujung pada tuntutan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan dan kemudian dia

---

[55] Mona Eltahawy, Tunisia's Jasmine Revolution, 15 Januari 2011 dalam situs http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2011/01/04/AR2011011405084.html dikutip 7 November 2019

akan dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan atas meninggalnya beberapa demonstran.

Kedua, dukungan Barat tidak datang pada masa krisis di mana dia sedang membutuhkannya. Bahkan Perancis tidak bersedia memberinya suaka politik sehingga Ben Ali akhirnya melarikan diri ke Arab Saudi. Presiden Barak Obama menyambut positif gerakan protes para demonstran. Tidak adanya dukungan Barat, terutama Amerika, yang dibutuhkan oleh Ben Ali karena Tunisia bukanlah negara yang menjaga kepentingan utama bagi Washington. Tunisia bagi Washington dan sekutunya adalah sebuah *peripheral interest*. Tunisia tidak mempunyai suplai minyak yang banyak dan juga tidak ada gerakan Islam, yang menjadi ketakutan Washington. Ekspor Tunisia juga lebih banyak ke pasar Eropa bukan ke Amerika. Ekspor Tunisia ke pasar Eropa mencapai 71% dari total ekspor yang dilakukan Tunisia.[56] Presiden Ben Ali akhirnya mundur dari jabatannya pada 14 Januari 2011 kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Tunisia yaitu Mohamed Ghannouchi.

Tunisia kemudian melaksanakan pemilihan umum untuk *National Constituent Assembly* pada 23 Oktober 2011. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh *Ennahda*, partai Islam moderat dengan perolehan suara 37% dari pemilih. *National Constituent Assembly* bertugas melakuakan pembaruan konstitusi negara. Konstitusi yang berlaku di Tunisia sebelumnya adalah konstitusi 1959 yang belum pernah diperbarui.[57] Tumbangnya rezim kuat Ben Ali di Tunisia oleh gerakan kekuatan massa (*people power*), menjadi sorotan media di seluruh dunia.

---

[56] Ahmad Sahide, 2015, *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hubungan Internasional vol.4 no.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hal 122- 123, http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237/2187 diakses pada 08 November 2019

[57] Erzebet, N. Rosza, dkk, 2012, *The Arab Spring: Its Impact On the Region and On Middle East Conference*, Policy Brief for for the Middle East Conference On A WMD/DV's FreeZone No 9/10 Agustus 2012, Academic Peace Orchestra Middle East hlm. 4 http://library.fes.de/pdffiles/iez/09609.pdf diakses pada 08 November 2019

Permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah tentang masalah perlindungan hak asasi manusia seperti kebebasan pers. Secara hukum Ben Ali telah melakukan pelanggaran HAM. Sejak Ben Ali mejabat menjadi Presiden pers dibatasi ruang geraknya. Jurnalis tidak boleh mengeluarkan berita yang merusak nama baik, dan fitnah terhadap pemerintah. Salah satu kasus yang paling disoroti adalah perlakuan terhadap watawan Taufik Ben Brik yang dilecehkan dan dipenjarakan atas kritiknya kepada Ben Ali.[58] Ben Ali berusaha menutup-nutupi kelemahan pemerintahannya. Jurnalis yang melakukan pelanggaran maka akan diberi sanksi penjara hingga lima tahun. Selama Ben Ali mengeluarkan peraturan tersebut sudah ada 100 jurnalis Tunisia yang dipenjarakan.[59] Permasalahan yang dihadapi oleh para jurnalis selama bertahun-tahun ini menjadi sebuah bumerang bagi pemerintah Ben Ali, karena para jurnalis melakukan serangan balik terhadap pemerintah dengan bergabung melawan pemerintah. Selain daripada itu dampak terjadinya *Arab Spring* di Tunisia ialah adanya *people power* yang menginginkan Ben Ali lengser dari jabatannya sebagai presiden. Rakyat Tunisia merasa kepemimpinan Ben Ali yang otoriter serta adanya ketidaksejahteraan yang merata dikalangan rakyat bawah menengah Tunisia, menuntut untuk diadakannya system yang lebih demokratis di Tunisia.

---

[58] Tamburaka, Apriadi . 2011. Revolusi Timur-Tengah. PT Buku Seru: Jakarta. Hal 28-35

[59] Freedomhouse.org, 2012, "*Tunisia: Freedom of the Press 2012*", www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/tunisia dikuttip pada 20 November 2019